

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR



RENCANA KERJA (RENJA PERUBAHAN) TAHUN 2025

KECAMATAN SANGATTA SELATAN
TAHUN 2025



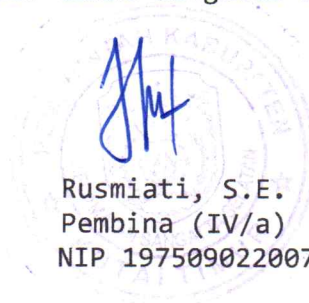
KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran ALLAH SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur dapat menyusun Renja OPD Tahun 2025 yang merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja ini masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan maupun kekeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data dan diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Renja Perubahan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Sangatta Selatan.

Sangatta Selatan, 31 Oktober 2025

Plt. Camat Sangatta Selatan



Rusmiati, S.E.
Pembina (IV/a)
NIP 197509022007012019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelahaan Usulan Rancangan dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III.TUJUAN DAN SARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	26
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KEC. SANGATTA SELATAN	
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sangatta Selatan....	27
BAB V. PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Per 30 September Tahun 2025
.....7

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sangatta Selatan
Kab. Kutai Timur 19

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Timur
Kecamatan Sangatta Selatan.....31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, Kecamatan Sangatta Selatan telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakannya. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sangatta Selatan. Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Sangatta Selatan Tahun berikutnya.

Renja Kecamatan Sangatta Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Renstra Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, mengacu pada program/kegiatan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 343 ayat (1) bahwa : perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah dalam rencana program dan kegiatan tahun anggaran berjalan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesian No. 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang- undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemeritahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3962):
6. Undang - undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817));
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan Uraian Tugas Pejabat Struktural dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan diKabupaten Kutai Timur

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangatta Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas

antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Kecamatan Sangatta Selatan yang merupakan bagian dari arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

b. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Sangatta Selatan Tahun 2025 yaitu:

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Tahun Anggaran 2025.
2. Menyediakan sarana pengendalian Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.
4. Menyajikan rencana Program, Kegiatan dan SubKegiatan yang dilakukan Perubahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Tahapan Rencana Kerja Kecamatan Sangatta Selatan sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 sesuai pasal 361 ayat 3, disajikan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelahaan Usulan Rancangan dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SANGATTA
SELATAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Renja Perubahan Perangkat Daerah

Untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan, maka perlu mengukur tingkat pencapaian yang telah diwujudkan pada akhir periode. Pengukuran ini diperlukan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, selain itu digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pelayanan di masa yang akan datang.

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan DPA Tahun 2025 Kecamatan Sangatta Selatan memiliki 6 (Enam) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 43 (Empat Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp 18.823.701.731,- (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Seribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)**. Pendanaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025. Program dan kegiatan dilaksanakan oleh 4 Seksi dan 2 Kasubag di lingkungan Kecamatan Sangatta Selatan.

Adapun rincian pagu Anggaran dan realisasi Anggaran Tahun 2025 per 30 September 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran per 30 September Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2025(Rp)	Realisasi Target Kinerja KECAMATAN SANGATTA SELATAN Sampai Dengan TRIWULAN III (Tahun Anggaran Berjalan)								CATA TAN
				Target		Realisasi		Tingkat Realisasi (%)				
				Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuang an (Rp)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Urusan Kewilayahan											
	Kantor Camat Sangatta Selatan											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip IP ASN/Indeks Profesionalitasa ASN										
	Perencanaan,Penganggara n,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan di Kecamatan										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	55.729.180	7	Doku men	55.729.180	6	Doku men	31.142.000	6	55.88	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	9.836.665.915	68	Org/ Bln	9.836.665.915	68	Org/ Bln	5.975.365.632	68	60.75	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	128.868.000	12	Doku men	128.868.000	9	Doku men	65.120.000	9	47.74	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	58.829.700	5	Laporan	58.829.700	3	Laporan	22.492.000	3	38.23	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	0	68	Paket	0	0	Paket	0	0	0	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000	1	Dokumen	20.000.000	0	Dokumen	10.369.000	0	51.85	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	44.560.000	8	Paket	44.560.000	0	Paket	0	0	0	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	22.000.000	3	Paket	22.000.000	1	Paket	5.531.000	1	25.14	
	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60.800.000	3	Paket	60.800.000	2	Paket	32.285.000	2	58.03	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	27.245.000	3	Paket	27.245.000	1	Paket	8.717.000	1	31.99	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.000.000	12	Laporan	32.000.000	3	Laporan	6.778.000	3	21.18	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	204.766.000	12	Laporan	204.766.000	3	Laporan	41.638.000	3	20.33	

	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	2	Doku men	15.000.000	1	Doku men	7.120.000	1	47.47	
--	----------------------------------	--	------------	---	-------------	------------	---	-------------	-----------	---	-------	--

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yand di sediakan	36.000.000	12	Lapo ran	36.000.000	6	Lapo ran	15.800.020	6	43.89	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	482.431.816	12	Lapo ran	482.431.816	10	Lap oran	456.431.816	10	94.61	
	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Laporan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	14.904.000	1	Lapo ran	14.904.000	0	Lapo ran	8.000.000	0	53.68	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang di layani										
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan										

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi /vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.414.520	1	Lapo ran	22.414.520	0	Lapo ran	13.747.800	0	61.33	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	25.414.520	1	Lapo ran	25.414.520	1	Lapo ran	20.897.500	1	82.23	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum										
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi Vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	25.414.930	1	Doku men	41.999.980	1	Doku men	8.118.500	0	31.94	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat										
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait non perizinan	25.414.780	1	Lapo ran	25.414.780	0	Lapo ran	9.707.500	0	38.2	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir										

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	25.415.000	3	Lemb aga	25.415.000	1	Lemb aga	13.135.000	1	61.68	
	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pembedayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan	25.415.000	1	Doku men	25.415.000	0	Doku men	12.468.000	0	49.06	
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	400.000.000	1	Lapo ran	400.000.000	0	Lapo ran	89.736.000	0	44.87	
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum										

	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sangatta Selatan										
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	30.414.780	1	Lapo ran	30.414.780	0	Lapo ran	16.168.000	0	53.16	

	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.000.000	1	Laporan	22.000.000	0	Laporan	0	0	0	
	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	30.414.590	1	Laporan	30.414.590	0	Laporan	9.025.500	0	29.67	
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase Masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan										
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamatan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar 1945,pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	22.415.000	20	Orang	22.415.000	0	Orang	0	0	0	

	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	22.415.000	1	Laporan	22.415.000	0	Laporan	6.380.000	0	28.46	
	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama , Ras , dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku,umat beragama,Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Local,Regional dan Nasional	62.245.000	80	Orang	62.245.000	25	Orang	17.399.000	25	27.95	

	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23.415.000	1	Dokumen	23.415.000	0	Dokumen	7.635.000	0	32.61	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik										
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20.415.000	3	Dokumen	20.415.000	0	Dokumen	0	0	0	
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32.830.000	3	Dokumen	32.830.000		Dokumen	9.623.000	0	29.31	
	Fasilitasi pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.415.000	3	Dokumen	20.415.000	0	Dokumen	7.638.000	0	48,97	

	Rekomendasi pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa	Jumlah Dokumen Fasiliitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20.415.000	3	Doku men	23.500.000	0	Doku men	0	0	0	
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	42.415.000	3	Doku men	42.415.000	3	Doku men	40.270.000	3	94.94	

	KANTOR KELURAHAN SINGA GEWEH											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip IP ASN/Indeks Profesionalitas ASN										
	Administrasi kepegawaian perangkat desa	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan yang disediakan	54.000.000	1	Pake t	54.000.000	0	Paket	0	0	0	
	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	177.741.994	1	Pake t	177.741.994	0	Paket	4.925.000	0	2.77	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	24.998.614	1	Pake t	24.998.614	0	Paket	3.097.933	0	12.39	
	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	75.000.000	1	Pake t	75.000.000	0	Paket	34.967.480	0	46.62	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan	30.240.000	1	Pake t	30.240.000	0	Paket	7.620.000	0	25.2	
	Fasilitasi Kunjungam Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	77.928.000	10	lapo ran	77.928.000	0	lapora n	2.160.000	0	2.77	
	Penyediaan Rapat Konsultasi dan Koordinasi	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.409.000	65	Lapo ran	62.409.000	3,0 8	Lapora n	25.430.000	0	40.75	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	39.000.000	12	Lapo ran	39.000.000	0	Lapora n	20.324.380	0	52.11	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	13.066.780	2	Unit	13.066.780	0	Unit	165.400	0	1.27	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir										
	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan di Kelurahan										

	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	49.994.210	6	Lembaga	49.994.2100	0	Lembaga	13.298.500	0	26.6	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3.003.364.000	35	RT	3.003.364.000	0	RT	63.400.000	0	2.11	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.093.454.000	5	Pokmas	3.093.454.000	0	Pokmas	915.882.000	0	29.61	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	49.997.000	1	Laporan	49.997.000	0	Laporan	0	0	0	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan										
	Peningkatan ketahanan pangan keluarga	Jumlah Keluarga Yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50.000.000	100	KK	50.000.000	0	KK	0	0	0	
	Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	49.998.210	100	KK	49.998.210	0	KK	0	0	0	
	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	49.996.000	100	KK	49.996.000	0	KK	0	0	0	

	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup	140.709.000	100	KK	140.790.000	0	KK	0	0	0	
	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	49.998.192	100	KK	49.998.192	10	KK	4.690.000		9.38	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sangatta Selatan

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator - indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing - masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur melaksanakan fungsi penunjang daerah di bidang pemerintahan, oleh karena itu Kecamatan Sangatta Selatan tidak termasuk dalam OPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Sangatta Selatan berdasarkan kinerja yang sudah ditentukan terhadap indikator kinerja kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 atau indikator kinerja utama yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja pelayanan di Kecamatan Sangatta Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Nilai SAKIP
2. IP ASN/Indeks Profesionalitas ASN
3. Presentase Masyarakat yang dilayani
4. Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir
5. Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Presentase Masyarakat yang memahami Wawasan Kebangsaan
7. Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit

organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan ukuran waktu tertentu.

TABEL 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sangatta Selatan
Kabupaten Kutai Timur

No	IKU	SPM / Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	SKM dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB nomor 14 thn 2017 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat
2	Persentase peningkatan rekomendasi hasil koordinasi bidang pem, trantib, kessos, perekonomian, dan pemb fisik yang di tindak lanjuti dalam satu tahun			90 %	92 %	95 %	95 %	88 %	88 %	90 %	90 %	
3	Persentase peningkatan desa/kelurahan dengan adm berkualitas baik											

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan Uraian Tugas Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur ditetapkan tugas kecamatan adalah : Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan fungsi kecamatan adalah :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan;

3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dari uraian di atas dapat diketahui kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan disamping harus memfasilitasi tugas dari OPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi. Disamping itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka diharapkan kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar publik harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Sangatta Selatan. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif.

Kecamatan Sangatta Selatan masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan, terkait dengan keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Kompetensi sumber daya manusia yang masih kurang
4. Kapasitas kelembagaan desa belum memadai
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang

6. Enclave lahan di wilayah Kecamatan Sangatta Selatan perlu ditingkatkan
7. Banyaknya kasus sengketa lahan

2.3. Isu - isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Sangatta Selatan dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Sangatta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Sangatta Selatan yang dilakukan oleh Kabupaten Kutai Timur;
2. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Sangatta Selatan yang dilakukan oleh Kabupaten Kutai Timur;
3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sangatta Selatan.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja dilingkungan Pemerintah Kecamatan Sangatta Selatan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Sangatta Selatan, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dan belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
2. Masih adanya ego sektoral masing-masing OPD tentang program dan kegiatan;
3. Belum optimalnya perencanaan strategis pada tingkat OPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk OPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
4. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
5. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen

- Pelaksanaan Anggaran OPD yang bersangkutan;
6. Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam penanganan bencana masih rendah;
 7. Masih kurangnya pemahaman aparat terhadap pengadaan barang dan jasa (metode swakelola).

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Sangatta Selatan sebagai berikut :

1. Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali tidak tuntas;
2. Masih belum optimalnya pelaporan kecamatan tentang program dan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
3. Masih minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;

Faktor - faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Sangatta Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Sangatta Selatan.

Masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat Pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKP

Renja Kecamatan Sangatta Selatan berdasarkan RKP Kabupaten Kutai Timur sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se Kabupaten

yang melaksanakan program dan Kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Sangatta Selatan.

Rancangan awal Prioritas pembangunan di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 merupakan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dan evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintahan

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/ kegiatan yang dibahas dalam musrenbang, dimana mekanismenya diawali dari pengalihan gagasan dari tingkat Rt/Dusun. Lingkungan melibatkan unsure tokoh masyarakat. Tokoh pemuda unsure perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang dibawah ke forum musrembangdes.

Pada forum musrenbang menghasilkan skala prioritas usulan. Tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di forum musrenbang tingkat kecamatan. Hasil musrenbang kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai skala prioritas program yang telah sesuai dengan kabupaten. Pelayanan masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing perangkat daerah yang ada pada unit pelaksana teknis ditingkat kecamatan

Program dan kegiatan kecamatan sangatta selatan kabupaten kutai timur tahun 2025 disusun dengan menampung usulan dari hasil pelaksanaan musyawarah. Perencanaan pembangunan, (musrenbang) tahun 2024 dan masyarakat rencana pembangunan desa tahun 2024 kemudian disusun menjadi rencana kerja kecamatan sangatta selatan tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan kebijakan nasional pemerintah Republik Indonesia adalah reformasi birokrasi, ada 4 tujuan reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan antara lain :

1. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan area perubahan :
 - Manajemen perubahan (mind set dan culture set)
 - Penguatan pengawasan
 - Penguatan akuntabilitas kinerja
2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, dengan area perubahan :
 - Penataan dan penguatan organisasi
 - Penataan sumber daya manusia (SDM)
3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dengan area perubahan :
 - Penataan peraturan penundang-undangan
 - Penataan tatalaksana
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan area perubahan
 - Peningkatan kualitas pelayanan public

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (*publik*) di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik

masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang **“menyentuh hati”** dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari **“dilayani”** menjadi **“melayani”**.

Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya dipelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip – prinsip tertentu, diantaranya: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa

pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel yang akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sangatta Selatan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi, dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Setiap semua yang akan melakukan sesuatu tentu mempunyai sebuah tujuan. Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan di mana suatu organisasi ingin mencapai ini dan pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan sebagai upaya bersama untuk itu. Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Kecamatan Sangatta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Menata dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu
2. Menata kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun sasaran yang ditetapkan oleh Kecamatan Sangatta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan serta Persatuan dan Kesatuan Masyarakat;
2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat;
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan, Aset, Pelayanan Publik dan Pemerintahan Desa Kecamatan Sangatta Selatan;
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sangatta Selatan;
6. Mewujudkan Administrasi Perkantoran Kecamatan Sangatta Selatan yang Transparan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SANGATTA SELATAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sangatta Selatan

Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur merencanakan 6 Program dan 18 Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 24.373.701.731 Secara keseluruhan ada 6 (Enam) program yang merupakan program prioritas secara terinci dalam beberapa program dan kegiatan.

4.1.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program yang akan dilaksanakan Kecamatan Sangatta Selatan Tahun 2025 berbeda dengan program tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 Klasifikasi Perencanaan Program dan Kegiatan berdasarkan peraturan baru yakni Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020, Program tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.1.2. Kegiatan

Untuk merealisasikan program kerja dan operasional maka diimplementasikan dalam kegiatan yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang secara riil memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Kecamatan Sangatta Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
9. Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12. Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
13. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah
14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
15. Fasilitasi Rekomendasi Dan Kooordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
16. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
17. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

4.1.3. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sangatta Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

5. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
6. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Fasilitas Kunjungan Tamu
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
12. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air Dan Listrik
14. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
15. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
16. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait
17. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
18. Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
19. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan
20. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
21. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
22. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
23. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
24. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
25. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan dan peraturan perundang undangan

dan /atau kepolisian negara Republik Indonesia

26. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
27. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konstultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
28. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
29. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
30. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa
31. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
32. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
33. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
34. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
35. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
36. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
37. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
38. Evaluasi Kelurahan
39. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
40. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
41. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup bersih dan Sehat
42. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
43. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Timur
Kecamatan Sangatta Selatan

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7		-9	-10
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN				-				-
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip IP ASN/IP Profesionalitas ASN		88%					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Dokumen					
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Kec. Sangatta Selatan	7 Dokumen	150.000.000	APBD		7 Dokumen	160.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	-			100%	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sangatta Selatan	68 orang/ Bulan	10.954.000.000	APBD		68 orang/ Bulan	11.000.000
7.01.01.2.02.03	Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sangatta Selatan	1 Dokumen	170.280.000	APBD		1 Dokumen	175.000.000

7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Sangatta Selatan	1 Laporan	147.816.440	APBD		1 Laporan	155.000.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang di sediakan	Kec. Sangatta Selatan	68 Paket	117.884.500	APBD		68 Paket	120.000.000
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Sangatta Selatan	1 Dokumen	41.270.000	APBD		1 Dokumen	45.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Kec. Sangatta Selatan	8 Paket	44.747.580	APBD		8 Paket	50.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kec. Sangatta Selatan	3 Paket	31.000.000	APBD		3 Paket	40.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang disediakan	Kec. Sangatta Selatan	3 Paket	117.000.000	APBD		3 Paket	150.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	Kec. Sangatta Selatan	4 Paket	34.000.000	APBD		4 Paket	40.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sangatta Selatan	12 Laporan	50.500.000	APBD		12 Laporan	55.000.000

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sangatta Selatan	12 Laporan	502.585.000	APBD		12 Laporan	505.000.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Sangatta Selatan	2 Dokumen	41.708.000	APBD		2 Dokumen	45.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	Kec. Sangatta Selatan	12 Laporan	36.000.0000	APBD		12 Laporan	40.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	Kec. Sangatta Selatan	12 Laporan	78.000.000	APBD		12 Laporan	85.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sangatta Selatan	100%	-			100%	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Sangatta Selatan	9 Unit	50.200.000	APBD		9 Unit	55.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani							
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							

7.01.02.2.01.01	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sangatta Selatan	1 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	30.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			-				
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Sangatta Selatan	1 Laporan	32.000.000	APBD		1 Laporan	35.000.000
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Sangatta Selatan	2 Dokumen	42.000.000	APBD		2 Dokumen	45.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat							
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait non perizinan	Kec. Sangatta Selatan	1 Laporan	27.000.000	APBD		1 Laporan	35.000.000

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir							
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sangatta Selatan	3 Lembaga	50.000.000	APBD		3 Lembaga	55.000.000
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Sangatta Selatan	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Sangatta Selatan	1 laporan	200.000.000	APBD		1 Laporan	210.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum							
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sangatta Selatan							

7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Terkait di wilayah Kecamatan	Kec. Sangatta Selatan	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	55.000.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Sangatta Selatan	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	55.000.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
7.01.04.2.02.01	Koordinasi /Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang - undangan dan/ kepoliasian Negara RI	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Republik Indonesia	Kec. Sangatta Selatan	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	55.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang memahami wawasan Kebangsaan							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Sangatta Selatan						

7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Sangatta Selatan	20 orang	50.000.000	APBD		20 orang	55.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan(Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Nasional	Kec. Sangatta Selatan	20 orang	60.224.000	APBD		20 Orang	65.000.000
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama,ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local,regional dan nasional	Kec. Sangatta Selatan	80 orang	366.778.480	APBD		20 orang	380.000.000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Sangatta Selatan	1 Dokumen	117.079..000	APBD		1 Dokumen	120.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik							

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sangatta Selatan						
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Kepala Desa	Kec. Sangatta Selatan	3 Dokumen	38.980.000	APBD		3 Dokumen	45.000.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Sangatta Selatan	30 Dokumen	135.567.000	APBD		30 Dokumen	140.000.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Sangatta Selatan	3 Dokumen	23.000.000	APBD		3 Dokumen	25.000.000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Sangatta Selatan	3 Dokumen	23.500.000	APBD		3 Dokumen	25.000.000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sangatta Selatan	3 Dokumen	62.000.000	APBD		3 Dokumen	65.000.000
KELURAHAN SINGA GEWEH									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Ip ASN/Indeks Profesionalitas ASN							
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut	Kel.Singa Geweh	1 Paket	54.000.000	APBD		1 Paket	60.000.000

	kelengkapannya	kelengkapan yang disediakan							
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7.01.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Kel.Singa Geweh	1 Paket	40.000.000	APBD		1 Paket	45.000.000
7.01.01.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kel. Singa Geweh	1 Paket	25.000.000	APBD		1 Paket	30.000.000
7.01.01.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	Kel.Singa Geweh	1 Paket	75.000.000	APBD		1 Paket	80.000.000
7.01.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	Kel. Singa Geweh	1 Paket	15.000.000	APBD		1 Paket	20.000.000
7.01.01.2.06.8	Fasiliasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kel. Singa Geweh	1 Laporan	77.928.000	APBD		1 Laporan	80.0000.000
7.01.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Singa Geweh	1 Laporan	180.000.000	APBD		1 Laporan	200.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kel. Singa Geweh	1 Laporan	20.000.000	DAU		1 Laporan	25.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya	Kel. Singa Geweh	2 Unit	13.072.000	DAU		2 unit	15.000.000
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir							
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan di Kelurahan							
7.01.03.02.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel.singa Geweh	6 Lembaga Kemasyarakan	50.000.000	DAU		6 Lembaga Kemasyarakan	55.000.000
7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Kel.singa Geweh	35 RT	3.003.364.000	DAU		35 RT	3.500.000.000
7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel.Singa Geweh	5 Pokmas/Ormas	2.619.216.963	DAU		5 Pokmas/Ormas	3.300.000.000
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kel.Singa Geweh	1 Laporan	50.000.000	DAU		1 Laporan	55.000.000
7.01.03.02.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							
7.01.03.02.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan Pangan Keluarga	Kel. Singa Geweh	100 KK	50.000.000	APBD		100 KK	55.000.000

7.01.03.02.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan sumber daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Kel. Singa Geweh	100 KK	50.000.000	APBD		100 KK	55.000.000
7.01.03.02.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kel. Singa Geweh	100 KK	50.000.000	APBD		100 KK	55.000.000
7.01.03.02.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Singa Geweh	100 KK	150.000.000	APBD		100 KK	155.000.000
7.01.03.02.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kel. Singa Geweh	100 KK	50.000.000	APBD		100 KK	55.000.000

Dana indikatif Rencana Kerja (Renja) didasarkan dengan Program dan Kegiatan yang sudah disesuaikan dengan pemuktahiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 50-3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Setiap Program dan kegiatan mempunyai indicator kinerja masing-masing seperti berikut ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator: Nilai Sakip dan IP ASN/Indeks Profesionalitas ASN

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator: Persentase Masyarakat yang dilayani

- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator : Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Indikator : Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Indikator : Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Indikator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator: Presentase Usulan Masyarakat Yang di akomodir

- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- b. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Indikator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan di Kelurahan

- c. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator: Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sangatta Selatan

- b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Indikator : Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator: Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator: Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik

- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sangatta Selatan Tahun 2025, merupakan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun ke lima atau Tahun terakhir Renstra 2021 – 2026. Program dan kegiatan yang direncanakan. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Kutai Timur dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh aparatur, serta peran aktif dari masing – masing Seksi dan Sub bagian yang ada di lingkungan Kecamatan Sangatta Selatan dalam memantau dan mengarahkan perkembangan penyusunan Renja